

# Analisis Penerapan Akuntansi Rumah Sakit dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 72

Jennice<sup>1</sup>, Catherine Valencia Lee<sup>2</sup>, Eilen Luskie<sup>3</sup>, Novita Angel Yang<sup>4</sup>, Shelfina Gowitri<sup>5</sup>, Shelina<sup>6</sup>, Tetty Tiurma Uli Sipahutar<sup>7</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

[jennicechang8@gmail.com](mailto:jennicechang8@gmail.com)<sup>1</sup>, [catherinevalencialee28@gmail.com](mailto:catherinevalencialee28@gmail.com)<sup>2</sup>, [eilenluskiee@gmail.com](mailto:eilenluskiee@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[novii.angell888@gmail.com](mailto:novii.angell888@gmail.com)<sup>4</sup>, [shelfinagowitri@gmail.com](mailto:shelfinagowitri@gmail.com)<sup>5</sup>, [shelina08082005@gmail.com](mailto:shelina08082005@gmail.com)<sup>6</sup>  
[ratuhapis.tetty@gmail.com](mailto:ratuhapis.tetty@gmail.com)<sup>7</sup>

## Article Info:

### Article history:

Received Date: 05/01/2025

Accepted Date: 20/01/2025

Published Date: 31/01/2025

### Keywords:

PSAK 45

PSAK 72

Hospital Accounting

Systematic Literature Review

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of accounting practices in hospitals, focusing on the compliance of financial statements with PSAK 45 and PSAK 72 through a systematic literature review method. This method consists of three stages: planning, implementation, and reporting, with data collected from various relevant literature sources. The study results indicate that implementing PSAK 45 and PSAK 72 in hospitals continues to face challenges related to revenue recognition and the presentation of financial statements according to applicable accounting standards. Several factors impacting the performance of accounting information systems in hospitals include user involvement, management support, and human resource training. This study concludes that while the implementation of accounting has progressed, further efforts are still needed to comply with the established standards fully.*

## Corresponding Author:

Jennice

Universitas Prima Indonesia

[jennicechang8@gmail.com](mailto:jennicechang8@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba memiliki tujuan utama yang tidak mengutamakan keuntungan finansial. Meskipun tidak mengejar laba, organisasi ini tetap membutuhkan informasi akuntansi untuk mengelola anggaran dan menutupi biaya operasional. Sumber daya yang digunakan dalam program nirlaba berasal dari masyarakat, sehingga laporan keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setiap organisasi nirlaba memiliki karakteristik unik yang memerlukan perbaikan dalam standarisasi pelaporan keuangan, yang harus selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Atufah, 2018). Organisasi nirlaba, termasuk rumah sakit, harus mempertanggungjawabkan dana atau sumbangan dari berbagai pihak kepada pihak internal dan eksternal. Namun, banyak organisasi nirlaba di Indonesia masih mengutamakan kualitas program daripada sistem manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang baik merupakan indikator utama akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga. Meningkatnya tuntutan transparansi informasi keuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengharuskan organisasi untuk menyiapkan laporan keuangan yang memenuhi standar (Dewi & Mulyani, 2020).

Laporan keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan entitas komersial, terutama dalam format dan penyajian informasi. Di Indonesia, organisasi nirlaba sering kali mengutamakan kualitas perencanaan daripada pengelolaan keuangan yang efektif, meskipun pengawasan ekonomi yang baik sangat penting untuk akuntabilitas dan transparansi (Marlinah & Ibrahim, 2018). Entitas nirlaba menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat tanpa mencari

keuntungan, mengandalkan pendanaan dari sumbangan internal dan eksternal. Untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, laporan keuangan rumah sakit harus mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan, khususnya PSAK No. 45, yang membahas tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Meiliana et al., 2023). Standar ini mengatur bagaimana laporan keuangan disajikan, diukur, dan dikarakterisasi secara kualitatif. Laporan keuangan rumah sakit harus menjadi acuan untuk pengambilan keputusan manajerial dan akuntabilitas kinerja. Pelaporan keuangan dalam organisasi nirlaba sangat penting untuk pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku dengan menggunakan metode kas atau akrual. Pengakuan pendapatan yang tepat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi (Ramadhani, 2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan penerapan standar ini, informasi keuangan dari entitas nirlaba diharapkan menjadi lebih mudah dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan (Tama & Firmansyah, 2021). Pentingnya laporan keuangan ini terletak pada perannya dalam melindungi kepentingan rumah sakit dan masyarakat, khususnya pasien, karena rumah sakit sebagai entitas nirlaba harus mematuhi peraturan pemerintah dan standar pelaporan yang ditetapkan oleh PSAK No. 45. Rumah sakit sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan beban, yang harus dicatat dengan tepat. Pengakuan pendapatan dan beban merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber pendanaan rumah sakit harus dievaluasi untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat dan transparan. Pendapatan utama rumah sakit biasanya berasal dari kegiatan operasional seperti rawat jalan dan rawat inap, di mana biaya operasional harus dikelola dengan tepat untuk meningkatkan kepuasan dan pendapatan pasien (Winarti & Jumriani, 2023). Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK No. 45 berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan sumber informasi penting bagi berbagai pihak terkait, termasuk donatur, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba. Kualitas penyajian laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan (Sukmantoro & Ekawati, 2021).

Selain itu, PSAK No. 72 juga mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan kontrak dengan pelanggan, yang bertujuan untuk memastikan pendapatan diakui tepat waktu dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Opti & Farina, 2020); (Yanti & Mursidi, 2021). Sebagai organisasi nirlaba, rumah sakit memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pendapatan utama rumah sakit berasal dari kegiatan operasional seperti rawat jalan dan rawat inap. Namun, dalam mengelola pendapatan dan beban, rumah sakit sering menghadapi kendala terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan. Kekeliruan dalam pengakuan pendapatan dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas rumah sakit (Suryono Endrojoyo & Vinola Herawaty, 2024). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) juga memberikan landasan hukum bagi rumah sakit pemerintah untuk mengelola keuangannya secara fleksibel namun tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 45 dan 72 di rumah sakit masih belum konsisten. Evaluasi terhadap penerapan standar tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan rumah sakit mencerminkan pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan ((Mufti, 2021). Beberapa rumah sakit BLU telah menerapkan PSAK No. 45 secara penuh, sementara beberapa rumah sakit lainnya masih menyusun laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelaporan keuangan pada rumah sakit berstatus BLU. Masalah utama yang sering terjadi dalam pencatatan pendapatan adalah pada saat pengakuan dan pengukuran (Ariyanti & Soraya, 2020). Kesalahan dalam pencatatan pengakuan pendapatan akan menyebabkan laporan laba rugi yang disajikan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya (Siddik et al., 2021).

(Anggraini & Tyas, 2023) menemukan adanya kesalahan dalam pencatatan pengakuan pendapatan di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru, di mana piutang tak tertagih seharusnya dicatat sebagai beban operasional, bukan pendapatan. Di sisi lain, (Caroline et al., 2024) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan di RS Wahidin Sudirohusodo sudah baik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. (Puspamurti & Firmansyah, 2020) menyoroti sulitnya mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan karena data kontrak tersebar di berbagai basis data, sistem aplikasi yang kurang memadai, dan keterbatasan keahlian sumber daya manusia, sehingga menyebabkan proses kerja masih manual. (Susilawati & Lusiawan, 2024) menemukan beberapa perusahaan hanya menerapkan sebagian tahapan pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72, sehingga terjadi ketidaksesuaian

pengakuan pendapatan. (Aghogho et al., 2021) juga mencatat pengakuan pendapatan sering kali tidak sesuai dengan PSAK 72 karena pendapatan diakui langsung saat transaksi terjadi, atau kontrak ditandatangani tanpa mempertimbangkan alokasi harga transaksi yang tepat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam terkait penerapan PSAK 72.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK No. 45 dan PSAK No. 72 dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba seperti rumah sakit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung keberlangsungan operasionalnya di masa mendatang. Standar ini menggunakan metode kajian pustaka sistematis (SLR) untuk meninjau penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan SAK pada organisasi nirlaba. SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan hasil penelitian yang terkait dengan topik yang diminati dan memberikan analisis terkait penerapan SAK pada organisasi nirlaba. Penelitian sebelumnya oleh (Nazila & Fahlevi, 2019); (Hidayat & Priyadi, 2022) menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Penelitian ini akan melengkapi penelitian tersebut dengan meninjau literatur yang ada secara sistematis.

## **2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

### **A. Akuntansi Rumah Sakit Organisasi Nirlaba**

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang sasaran utamanya adalah untuk mendukung suatu isu atau masalah dalam menarik perhatian masyarakat untuk tujuan yang tidak bersifat komersial, tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat mencari keuntungan (moneter) (Fatimah, 2024). Pada organisasi nirlaba, sumber daya atau dana yang digunakan dalam menjalankan segala kegiatannya berasal dari para donatur atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesama. Tujuan dari organisasi nirlaba adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, terutama dalam bidang ekonomi. Pada prinsipnya pencatatan organisasi nirlaba dari penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan produk atau jasa, penyusutan, dan transaksi-transaksi rutin lainnya tidak berbeda dengan organisasi bisnis, namun yang membedakannya adalah organisasi nirlaba tidak memiliki pihak yang menjadi pemilik, sehingga tidak ada transaksi yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan atau tidak ada alokasi dana likuidasi atau sumber daya kepada orang-orang tertentu. Menurut Nowicki, akuntansi rumah sakit dapat diartikan sebagai pengumpulan, komunikasi, dan interpretasi data historis dan proyeksi ekonomi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil operasi rumah sakit untuk pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak berkepentingan lainnya. Akuntansi rumah sakit berfungsi untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam manajemen dan pengambilan keputusan internal rumah sakit. Menurut (Priandini & Biduri, 2023), "Akuntansi rumah sakit yang merupakan salah satu kegiatan manajemen keuangan merupakan salah satu sasaran awal yang harus ditingkatkan untuk menyediakan data dan informasi yang akan mendukung manajer rumah sakit dalam pengambilan keputusan serta pemantauan dan pengendalian kegiatan rumah sakit."

### **B. PSAK No. 45 Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba**

PSAK No. 45 merupakan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Standar ini merupakan penyempurnaan dari PSAK 45 yang diamandemen pada tanggal 23 Desember 1997 (Buku-SAP-2021). Sumber daya yang diperoleh organisasi nirlaba berasal dari individu yang memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan dan kontribusi dari anggota. Hal ini menyebabkan terjadinya transaksi yang tidak terjadi atau tidak akan terjadi dalam organisasi bisnis, seperti penerimaan sumbangan. Banyak organisasi nirlaba memperoleh dana melalui utang tetapi memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan operasional yang didanai oleh pendapatan layanan yang ditujukan kepada publik. Oleh karena itu, pengukuran arus kas masuk dapat menjadi tolok ukur kinerja yang penting bagi pengguna laporan keuangan organisasi, seperti penyandang dana atau kreditor.

Entitas nirlaba tidak memiliki pemegang saham atau pemangku kepentingan serupa, menyediakan layanan publik tanpa maksud untuk memperoleh laba, dan khususnya, entitas pemerintah dapat mengamanatkan wajib pajak untuk mendukung keuangan pemerintah, terlepas dari apakah kompensasi untuk wajib pajak dianggap memadai atau tidak memadai. Organisasi nirlaba bertujuan untuk memperjuangkan suatu tujuan atau isu dengan menarik perhatian publik untuk tujuan nonkomersial tanpa memperhatikan tujuan moneter yang mencari keuntungan.

Menurut PSAK 45, halaman 2, paragraf 01, kriteria entitas nirlaba adalah:

- a. Sumber dana berasal dari sumbangan yang diberikan oleh anggota atau pihak lain tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Organisasi menghasilkan barang atau jasa tanpa mendistribusikannya kepada manajemennya.

- c. Kepemilikan dan keuntungan tidak dapat dialihkan atau dijual setelah organisasi nirlaba dibubarkan. Laporan keuangan organisasi nirlaba, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45, meliputi:
  1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode pelaporan:

Laporan posisi keuangan merinci jumlah setiap kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidak adanya pembatasan yang dikenakan oleh donor, yaitu dibatasi secara permanen, dibatasi sementara, dan tidak dibatasi. Definisi istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

    - a. Pembatasan permanen mengacu pada pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh donor untuk memastikan sumber daya tersebut dipertahankan tanpa batas waktu. Namun, organisasi dapat memanfaatkan semua atau sebagian dari aset tersebut atau manfaat ekonomi lainnya dari sumber daya tersebut.
    - b. Pembatasan sementara adalah pembatasan yang diberlakukan oleh donor, yang menetapkan bahwa sumber daya tersebut harus dipertahankan hingga periode tertentu atau hingga kondisi tertentu terpenuhi.
    - c. Sumbangan terbatas adalah sumber daya yang ditetapkan oleh donor untuk tujuan tertentu, yang dapat memiliki pembatasan permanen atau sementara.
    - d. Sumbangan tidak terbatas adalah sumber daya yang tidak ditetapkan untuk tujuan tertentu.
  2. Laporan Aktivitas  
Laporan aktivitas menguraikan perubahan dalam aset bersih yang dibatasi secara permanen, dibatasi sementara, dan tidak dibatasi. Maksud utama dari laporan aktivitas adalah untuk memberikan informasi mengenai:
    - a. Dampak transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih.
    - b. Korelasi antara transaksi dan peristiwa lain.
    - c. Bagaimana sumber daya digunakan untuk mengimplementasikan berbagai program atau layanan?
  3. Laporan Arus Kas untuk Satu Periode Pelaporan  
Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan ini menilai kemampuan organisasi untuk mengelola arus kas. Kemampuan untuk menghasilkan uang tunai terkait dengan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan organisasi.  
Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah (Sholikh, 2020):
    - a. Laporan keuangan organisasi nirlaba harus menyediakan informasi yang berguna bagi penyedia dan calon pengguna lainnya untuk membuat keputusan rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
    - b. Menyediakan informasi untuk membantu penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pengguna dan calon pengguna lainnya, menilai layanan yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan layanan.
    - c. Menyediakan informasi bagi penyedia sumber daya dan calon penyedia, serta pengguna dan calon pengguna lainnya, untuk menilai kinerja manajer organisasi nirlaba dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen dan aspek kinerja lainnya.
    - d. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dan transaksi, peristiwa, dan insiden yang mengubah sumber daya dan kepentingan atas sumber daya tersebut.
    - e. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama suatu periode.
    - f. Memberikan informasi tentang bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan uang tunai atau sumber daya.
    - g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pengguna memahami informasi keuangan yang diberikan.

### C. PSAK No. 72 Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba

PSAK 72 merupakan standar akuntansi keuangan baru untuk mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Dengan berlakunya PSAK 72, diharapkan informasi yang diberikan entitas mengenai pendapatan dan arus kas dapat lebih bermanfaat dari segi sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian (Rafrini Amyulianthy et al., 2022). IAI menyatakan bahwa ruang lingkup pendapatan yang tercantum dalam PSAK 72 dapat digunakan untuk semua kontrak dengan pelanggan, kecuali kontrak sewa guna usaha, kontrak asuransi, instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual, dan pertukaran nonmoneter antara perusahaan dalam bisnis yang sama untuk melakukan penjualan dengan pelanggan atau calon pelanggan (Simanjuntak et al., 2024).

Menurut PSAK 72 (2018), pendapatan merupakan penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal suatu

entitas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan merupakan arus masuk bruto yang bukan berasal dari kontribusi investasi melainkan diperoleh dari aktivitas normal entitas dalam suatu periode sehingga dapat bertambah dalam entitas tersebut. Menurut Santoso (Aghogho et al., 2021), pendapatan merupakan kenaikan atau pendapatan aktiva suatu perusahaan yang diperoleh dari pelunasan kewajiban perusahaan selama periode tertentu yang disebabkan oleh kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan seperti penyerahan suatu produk, jasa, dan kegiatan lainnya dalam perusahaan.

International Accounting Standards Board (IASB) menyatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu akun utama dalam laporan keuangan yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna terkait penilaian kinerja dan posisi ekonomi suatu perusahaan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh suatu entitas karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan baik dengan menyediakan jasa maupun pengadaan barang. Dengan demikian, pendapatan menjadi indikator atau tujuan utama dalam suatu perusahaan untuk memperoleh laba sehingga nilai pendapatan diukur secara wajar dan sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku (Aghogho et al., 2021). Menurut (Londa et al., 2020), pendapatan merupakan penghasilan dari hasil penjualan, pendapatan jasa, bunga, deviden, dan royalti yang merupakan kegiatan rutin suatu entitas. Sedangkan menurut (Boujelben & Kobbi-Fakhfakh, 2020), pendapatan merupakan salah satu bagian teratas dari laporan laba rugi yang biasanya menjadi tolok ukur bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja dan prospek ekonomi perusahaan. Menurut (Solekha, 2022), pendapatan penting bagi para investor untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, karena pendapatan berpotensi memengaruhi kontrak penjualan, rencana kompensasi, strategi pemasaran, pengembangan produk, dan komisi penjualan. Menurut (Mayusfa et al., 2023), pendapatan berasal dari mana saja yang dimiliki perusahaan, baik dari hasil penjualan barang, jasa, maupun penghasilan lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Karakteristik pendapatan merupakan perolehan laba yang lahir dari setiap kegiatan produksi utama dan berkelanjutan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan atau perolehan aktiva yang diperoleh suatu entitas setelah kewajiban pelaksanaannya diselesaikan dan menjadi akun utama dalam laporan keuangan dalam menilai kinerja ekonomi perusahaan.

#### **D. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan**

Bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, pendapatan diakui sebagai salah satu ukuran kinerja keuangan yang substansial karena pendapatan merupakan standar dasar keberhasilan kinerja ekonomi dan penilaian kinerja (van Wyk & Coetsee, 2020). Menurut standar yang berlaku, pendapatan harus diakui secara wajar untuk menstandarisasi pengakuan pendapatan secara tepat dan pada waktu yang tepat untuk mencerminkan kebenaran. Namun, pengukuran dan pengukuran pendapatan merupakan hal yang kompleks dalam organisasi nirlaba seperti rumah sakit karena sumber pendapatan yang beragam dan karakteristik operasional yang unik. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan PSAK 72 secara konsisten di seluruh sektor. (Puspamurti & Firmansyah, 2020) mengidentifikasi kendala dalam tahap identifikasi kontrak, yang disebabkan oleh kurangnya sistem manajemen kontrak yang andal dan keterbatasan keahlian sumber daya manusia. (Londa et al., 2020) menemukan bahwa beberapa perusahaan hanya menerapkan sebagian dari tahapan pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan. (Aghogho et al., 2021) menyoroti bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan seringkali tidak sesuai dengan PSAK 72 karena pendapatan diakui secara langsung pada saat transaksi terjadi atau kontrak ditandatangani tanpa mempertimbangkan alokasi harga transaksi yang tepat.

Menurut (Veronica et al., 2019), salah satu faktor utama dalam menentukan pendapatan suatu perusahaan adalah pengakuan pendapatan. Agar perusahaan dapat menunjukkan nilai sebenarnya dalam laporan keuangan, perusahaan perlu mengakui pendapatan pada waktu yang tepat dan tepat. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah saji dalam pelaporan informasi keuangan perusahaan dan agar pengambilan keputusan di masa mendatang menjadi lebih akurat.

Dalam akuntansi, masalah utama pendapatan adalah menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan karena pengakuan pendapatan yang tidak akurat dapat memengaruhi laba bersih perusahaan, dan ketidakakuratan ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan menjadi tidak dapat diandalkan (Tama & Firmansyah, 2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 72 tentang Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 yang telah berlaku di Eropa sejak Januari 2018. Tujuannya adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan



pelanggan.

Dalam PSAK No. 72, terdapat tahapan dalam pengakuan pendapatan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- b. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terkandung dalam kontrak.
- c. Menetapkan harga transaksi.
- d. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
- e. Mengakui pendapatan ketika entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak

Entitas menetapkan jumlah harga transaksi ini dengan mempertimbangkan ketentuan kontrak dan praktik bisnis umum entitas. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan berhak diterima entitas sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Entitas mempertimbangkan ketentuan kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan memengaruhi estimasi harga transaksi. Entitas dapat mengakui pendapatan untuk memenuhi kewajiban kinerja pada waktu tertentu jika kriteria untuk pengakuan pendapatan dan pemenuhan kewajiban kinerja dari waktu ke waktu tidak terpenuhi.

Menurut PSAK 72, berikut ini adalah beberapa indikator pengalihan kendali atas barang atau jasa dari pemenuhan kewajiban kinerja pada waktu tertentu oleh entitas.

- a. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran barang atau jasa.
- b. Pelanggan memiliki kepemilikan sah atas barang atau jasa.
- c. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset/barang.
- d. Pelanggan memiliki manfaat dan risiko signifikan atas kepemilikan barang atau jasa.
- e. Pelanggan telah menerima barang atau jasa.

Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak tersebut dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, tergantung pada hubungan antara pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat atas imbalan secara terpisah sebagai piutang.

Dalam hal pengungkapan, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif dalam laporan keuangannya tentang semua hal berikut:

- a. Kontrak dengan pelanggan (pengelompokan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang tersisa);
- b. Pertimbangan dan perubahan signifikan yang dibuat dalam penerapan Standar ini pada kontrak tersebut (menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan dan harga transaksi serta jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan); dan
- c. Aset diakui dari biaya perolehan atau pemenuhan kontrak dengan pelanggan.

#### **E. Dampak Penerapan PSAK terhadap Akuntansi Rumah Sakit**

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam akuntansi rumah sakit berdampak signifikan terhadap pelaporan keuangan dan manajemen operasional rumah sakit. PSAK membantu rumah sakit menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan terstandarisasi sehingga memudahkan pihak internal maupun eksternal untuk memahami kondisi keuangan rumah sakit. Akuntabilitas rumah sakit pun meningkat, terutama dalam pelaporan penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah, investor, maupun sumber lain yang diatur dalam PSAK 45.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan mendasar yang utama terletak pada bagaimana organisasi tersebut memperoleh sumber daya untuk menjalankan berbagai kegiatan operasionalnya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan donatur lain yang tidak mengharapkan imbalan (IAI PSAK 45). Akibat karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba muncul transaksi tertentu yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, seperti penerimaan sumbangan. Namun, organisasi nirlaba sering kali muncul dalam berbagai bentuk dalam praktiknya, sehingga biasanya sulit dibedakan dengan organisasi bisnis. Meskipun tidak terdapat kepemilikan dalam beberapa bentuk organisasi nirlaba, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasionalnya dari pendapatan dari layanan yang diberikan kepada publik. Oleh karena itu, pengukuran jumlah, waktu, dan kepastian arus kas menjadi ukuran kinerja yang krusial bagi para pengguna laporan keuangan organisasi, seperti kreditor dan penyedia dana lainnya. Jenis organisasi ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis. (IAI, 2019).

PSAK 72, yang diberikan sebagai pedoman, diterapkan untuk mencatat pendapatan, beban, dan aset rumah sakit secara akurat. PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan) memastikan pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip akrual, yang penting untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan pendapatan dari layanan medis. Penerapan PSAK yang komprehensif memerlukan pelatihan dan pemahaman yang mendalam oleh staf keuangan rumah sakit. Namun, manfaat jangka panjang dari Standar tersebut mencakup peningkatan kredibilitas dan keberlanjutan rumah sakit sebagai entitas bisnis dan layanan publik. Tantangan penerapan PSAK 72 dapat menjadi lebih kompleks dalam konteks rumah sakit. Rumah sakit memiliki berbagai sumber pendapatan, seperti layanan medis, penjualan obat, dan sumbangan. Kontrak dengan pasien, asuransi, dan pihak ketiga lainnya dapat memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja dan mengalokasikan harga transaksi. Selain itu, rumah sakit sering kali memberikan layanan dengan harga diskon atau bahkan gratis kepada pasien berpenghasilan rendah, yang dapat memengaruhi pengukuran pendapatan. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan PSAK 72 secara umum, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis dampak penerapan PSAK 72 terhadap pengukuran pendapatan di rumah sakit dengan karakteristik operasional yang unik.

### 3. METODE PENELITIAN

Tinjauan pustaka sistematis merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil pertanyaan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Tinjauan pustaka sistematis merupakan metode tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis permasalahan pada suatu topik masalah serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan data dari jurnal yang tersedia dalam bentuk teks lengkap. Pendekatan metode ini terstruktur, mengikuti tahapan dan kaidah serta menghindari pemahaman subjektif oleh peneliti (Rachmawati et al., 2022). Beberapa penelitian tinjauan pustaka telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. (Amelia et al., 2023) dengan judul Tinjauan Pustaka Sistematis: Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Rumah Sakit di Indonesia (Melia, 2022). Hasil penelitian dengan menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jurnal-jurnal penting, faktor-faktor yang mempengaruhi, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti yang paling aktif, serta topik dan tren penelitian. Setelah mencari di semua database Google Scholar, saya tidak menemukan penelitian tentang penerapan standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian SLR yang akan dibahas disini adalah mengkaji semua artikel yang berhubungan dengan penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia untuk melihat bagaimana penerapan standar akuntansi moneter bagi organisasi nirlaba di Indonesia, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Ikatan Akuntansi Indonesia.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata penerapan selalu dianggap oleh sejumlah pihak pengambilan keputusan hanya sebatas pelaksanaan dari yang telah ditetapkan. Namun pada praktiknya, penerapan ini memiliki peran penting karena sangat bermanfaat agar terlaksananya suatu organisasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu tindakan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi yang sudah direncanakan.

Lembaga sosial seperti rumah sakit, organisasi maupun kantor belum menyajikan keuangannya sesuai dengan PSAK 45. Salah satu kendala juga disebutkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan.

1. Organisasi nirlaba (masjid, pesantren, yayasan, lembaga sosial, panti asuhan) pada umumnya laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Organisasi nirlaba harus menyusun 5 jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan laporan untuk organisasi nirlaba yang baik adalah dengan menerapkan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditentukan oleh IAI yaitu PSAK 45 dan ISAK 35.
2. Metode pencatatan laporan keuangan dengan *single entry* dan basis kas.

3. Kendala yang dihadapi oleh organisasi nirlaba yakni keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan dan pemahaman pengelola terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, tidak memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan akan mengalami kesulitan dalam hal penggolongan akun-akun.

Menurut (Pradanti & Lestari, 2022) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan PSAK No 45 di rumah sakit antara lain adalah:

- a. Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan,
- b. Ketersediaan sistem informasi akuntansi terintegrasi dan mendukung proses pembuatan laporan keuangan,
- c. Ketersediaan pedoman dan regulasi yang jelas dan konsisten mengenai penyusunan laporan keuangan rumah sakit,
- d. Kesadaran dan komitmen manajemen rumah sakit untuk menerapkan PSAK No 45 sebagai bagian dari sistem rumah sakit yang baik

Berdasarkan paparan di atas, pencatatan laporan keuangan pada organisasi nirlaba umumnya masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia telah membuat ISAK 35, sebagai standar yang berlaku saat ini, untuk organisasi nonlaba namun belum sepenuhnya dapat dijalankan. Penerapan standar akuntansi keuangan pada organisasi nirlaba sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal karena dengan penyajian dan pencatatan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan akan menyajikan laporan keuangan sebuah organisasi dengan rapi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik yang baik dan pengembangan organisasi yang lebih besar. Namun hal ini, pengelola harus didukung oleh pengetahuan dasar akuntansi.

PSAK 72 yang mulai berlaku pada tahun 2020 mengubah konsep pengakuan pendapatan dan berdampak pada laporan laba rugi sehingga berdampak pada pengungkapan kinerja keuangan. Kepatuhan terhadap PSAK No. 72 dengan mengakui pendapatan atas pengalihan barang secara "*at a point in time*" dan pengalihan jasa secara "*over time*." Hal ini dibuktikan melalui pengakuan pendapatan yang didasarkan pada pengalihan pengendalian barang dan jasa, di mana pelanggan telah memperoleh manfaat dan risiko secara signifikan. Perusahaan juga memastikan bahwa pengukuran pendapatan dilakukan secara sistematis, termasuk pengalokasian diskon atau potongan harga. Dengan demikian, RS telah menunjukkan praktik pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 72, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatannya.

PSAK 72 mengadopsi sepenuhnya IFRS 15: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, standar pengaturan pengakuan pendapatan. PSAK No. 72 mengatur lima tahapan yang harus dipenuhi perusahaan untuk mengakui pendapatan, yaitu mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban kinerja, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan mengakui pendapatan pada saat kewajiban kinerja telah dialihkan. Hal baru dalam PSAK NO 72 terletak pada basis akuntansi umum, yaitu basis berbasis prinsip yang dapat diterapkan dalam setiap situasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi pengakuan pendapatan rumah sakit untuk memastikan keberlanjutan rumah sakit di masa mendatang.

Pendapatan rumah sakit diperoleh dari kegiatan normal suatu perusahaan. Isu pendapatan yang krusial dalam akuntansi adalah bagaimana suatu perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan dalam suatu periode. Agar laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan memiliki nilai wajar, perusahaan harus tepat dan tepat dalam mengakui dan mengukur pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan merupakan transaksi yang oleh perusahaan diakui sebagai pendapatan. Sebaliknya, pengukuran pendapatan merupakan transaksi signifikan yang diakui perusahaan sebagai pendapatan dalam suatu periode tertentu.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian metode *Systematic literature review* organisasi nirlaba di Indonesia belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan untuk organisasi nonlaba telah dibuat oleh Ikatan



Akuntansi Indonesia, yaitu PSAK 45 dari tahun 2009, dan sekarang ini ISAK 35 yang mulai efektif tahun 2020. Maka dari itu dengan sudah adanya standar tersebut, semua organisasi nirlaba harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Standar tersebut digunakan agar pelaporan keuangan tertata rapi dan menjaga akuntabilitas serta transparansi pihak pengguna/donator. Penyajian laporan keuangan terkendala dengan keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu organisasi nirlaba masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan bagi pihak eksternal maupun internal. Penelitian *Systematic literature review* ini memiliki keterbatasan pada batasan pencarian data dan juga *data base* yang digunakan hanya Google scholar saja. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas kriteria pencarian seperti menambah rentang waktu yang digunakan untuk pencarian *paper* dan penambahan *data base* Web of science group, Scimago journal & country, ProQuest, EBSCO, Emerald Insight.

## 6. SARAN

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi penyebab utama ketidaksesuaian yang ditemukan, seperti kurangnya pemahaman terhadap ketentuan PSAK No. 45 atau keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola laporan keuangan nirlaba. Penelitian juga mengkaji dampak implementasi PSAK No. 72 terhadap kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi efektivitas metode pengukuran pendapatan "*at a point in time*" dan "*over time*" dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan. Peneliti diharapkan juga menggali potensi tantangan atau kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 72, terutama dalam pengelolaan kontrak dengan pelanggan dari berbagai jenis layanan kesehatan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan PSAK dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

## 7. REFERENSI

- Aghogho, M. M., Kalangi, L., & Kindangen, W. (2021). Evaluasi penerapan PSAK no.72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Bitung Cemerlang. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1003–1010.
- Amelia, D., Setiaji, B., Jarkawi, J., Primadewi, K., Habibah, U., Peny, T. L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Metpen*.
- Anggraini, N., & Tyas, A. M. (2023). Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Menurut Sak Etap Dan Psak 72 Pada Pt. Gunawangsa Putra Perkasa. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 20(1), 26–38.
- Ariyanti, R., & Soraya, L. T. (2020). Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Utd Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 18(45), 56–68. <https://doi.org/10.54911/litbang.v18i0.119>
- Atufah, I. D. (2018). Penerapan Psak No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*, 2(3), 115. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i3.16218>
- Boujelben, S., & Kobbi-Fakhfakh, S. (2020). Compliance with IFRS 15 mandatory disclosures: an exploratory study in telecom and construction sectors. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0137>
- Caroline, E., Mulyadi, M., & Sianipar, P. B. H. (2024). Analisis Penerapan SAK 72 Atas Pendapatan dan Pengakuan Biaya pada PT Pelita Mutiara Indah. *Jurnal Economina*, 3(2), 393–410. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1218>
- Dewi, E. K., & Mulyani. (2020). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA PADA PANTI ASUHAN AL-HUSNA BUKIT PAMULANG INDAH. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(2), 29–39.
- Fatimah, N. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H . M . Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. x, 389–398.
- Hidayat, M. N., & Priyadi, I. H. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5780>
- IAI. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Ikatan Akuntan Indonesia*, 130.

- Londa, A. P., Manossoh, H., & Mintalangi, S. S. E. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT Pos Indonesia (PERSERO) Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1154–1161.
- Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 45(45), 1–19.
- Mayusfa, Y., Putri, I., & Azmi, Z. (2023). Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Terhadap Pendapatan Kontrak Pelanggan Menurut PSAK No. 72 di PT Guna Bangun Wisata Tahun 2021-2022. *Horizon in Accounting Society*, 2(1), 128–134.
- Meiliana, I., Fauzan, S., Zulov, W., & Yanti, F. (2023). Analisis Implementasi PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 9(1), 2319–2326. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1486>
- Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.14500>
- Mufti, D. (2021). Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Di Makassar. *Keunis*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i1.2197>
- Nazila, S. R., & Fahlevi, H. (2019). ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO. 45 PADA MASJID DI KOTA BANDA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 1.
- Opti, S., & Farina, K. (2020). Laporan Keuangan Masjid Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 22–33.
- Pradanti, A. M., & Lestari, U. P. (2022). Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Berlakunya PSAK 72 pada Penjualan Bangunan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.
- Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.6>
- Puspamurti, H., & Firmansyah, A. (2020). Penerapan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 4(2), 73–110. <https://doi.org/10.36766/ijag.v4i2.129>
- Rachmawati, D. W., Khulaifayah, Musni, Serdianus, Bahri, Indarwati, & Sam, K. L. N. (2022). Metodologi Penelitian. In A. Purnamasari (Ed.), *Cendekia Publisher* (Cetakan Pe, Issue August). Cendekia Publisher.
- Rafrini Amyulianthy, Rahmat, T. I., & Munira, M. (2022). Analisis Dampak Implementasi PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 159–169. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.13>
- Ramadhani, S. R. (2018). *Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani (PSDI) di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati*. dspace.uui.ac.id.
- Siddik, A. S. A., Morasa, J., Weku, P., Sukma, A., Siddik, A., Morasa, J., Weku, P., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analysis of Recognition and Measurment of Income Based on Psak No.72 At Swiss Bellhotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 999–1007.
- Simanjuntak, N. B., Siringoringo, M. J. B., & Manurung, A. (2024). The Effect of Implementing PSAK 72 on Financial Performance and Shareholders Value at the Property Company Registered on the IDX for the 2018-2020 Period. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 180–186. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.726>
- Solekha, Y. A. (2022). the Implication: Implementation Psak 72 on Corporate Tax 2019-2020. *Balance: Journal of Islamic Accounting*, 3(2), 161–178. <https://doi.org/10.21274/balance.v3i2.6314>
- Sukmantoro, P. I., & Ekawati, E. (2021). Penerapan PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Nirlaba di Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 40–64. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.500>
- Suryono Endrojoyo, & Vinola Herawaty. (2024). Penerapan PSAK 72: Pengaruh Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih pada Perusahaan di Industri Real Estate dan Properti dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 3808–3827. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3682>

- Susilawati, & Lusiawan, N. T. A. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Menurut PSAK 72. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(1), 29–37.
- Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021). Perbedaan Perlakuan Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Sebelum. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, September.
- van Wyk, M., & Coetsee, D. (2020). The adequacy of IFRS 15 for revenue recognition in the construction industry. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.474>
- Veronica, V., Lestari, U. P., & ... (2019). Analisis dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan real estat di Indonesia yang terdaftar di Bursa .... *Research Workshop and ...*, December. <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1451>
- Winarti, & Jumriani, □. (2023). YUME : Journal of Management Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 374–387.
- Yanti, D. A. W., & Mursidi, M. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.266>